

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Hegemoni Pemerintah Terhadap Pedagang Pasar (Analisis Dominasi Pemerintah Pasca Revitalisasi Pasar *Kite* Sungailiat Menurut Antonio Gramsci)” yang telah dilakukan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, konsep revitalisasi Pasar *Kite* Sungailiat yaitu dengan pembangunan berbasis masyarakat dimana yang menjadi perhatian adalah keinginan masyarakat. Namun yang terjadi, pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan dari atas dimana pemerintah mengambil alih seluruh proses pembangunan dan membuat kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi pedagang.

Kedua, dilihat adanya hegemoni pemerintah terhadap pedagang pasar. Pemerintah merupakan kelas yang mendominasi dalam pengelolaan pasar sehingga segala aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus diikuti oleh pedagang. Pedagang memiliki kesadaran ganda yang terbentuk dari kesadaran yang dipengaruhi oleh pemerintah dan kesadaran revolusioner dari keseharian yang dilakukan pedagang.

Bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang yakni :

(a) Sejak awal pedagang menolak adanya revitalisasi Pasar Bawah. Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pedagang dalam melaksanakan revitalisasi pasar. Pendekatan dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi dan konsensus untuk mendapatkan persetujuan pedagang. Hal ini

menunjukkan bentuk hegemoni pertama yang dilakukan pemerintah dalam upaya revitalisasi pasar. (b) Hegemoni dilakukan pemerintah dalam upaya pembagian lapak. Proses pembagian lapak pedagang dilakukan dengan sistem cabut lot sebagai aturan yang ditetapkan pemerintah untuk meredam protes pedagang nantinya. Sebagai titik tolak dari konsep hegemoni, konsensus merupakan jalan pendekatan untuk membentuk kesepakatan secara sadar dari pedagang tanpa melakukan paksaan. Terlebih dengan gaya kepemimpinan pemerintah yang intelektual membuat pedagang cepat membentuk kesadaran tersebut. (c) Konsensus dilakukan pemerintah sebagai titik tolak dari hegemoni pemerintah. Pemerintah berupaya melakukan pendekatan dengan pedagang melalui jalan konsensus. Konsensus ini dilakukan secara sepihak antara pemerintah terhadap pedagang pasar. Pemerintah berupaya untuk mendapat persetujuan pedagang secara sadar sedangkan pedagang pasar tidak memiliki posisi tawar untuk menentang. (d) Pedagang sebagai pihak yang didominasi harus dengan sadar mengikuti setiap kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah walaupun disisi lain pedagang memiliki kesadaran untuk melakukan perlawanan. Pedagang dengan sukarela mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah, walau aturan tersebut tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan.

Sampai kapan pun, Hegemoni pemerintah terhadap pedagang tidak akan pernah berakhir dan akan terus berjalan. Pedagang akan terus berada dibawah bayang-bayang aturan yang dibuat pemerintah meskipun sebetulnya pemerintah tidak mengetahui keinginan sesungguhnya dari pedagang pasar.

B. Implikasi Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori Antonio Gramsci mengenai Hegemoni. Hegemoni menggambarkan suatu dominasi satu kelas atas kelas lain yang

disebabkan secara ideologis dan politis (Abercrombie, 2010 : 253). Masyarakat kapitalis menganggap paksaan secara sadar dapat lebih dominan untuk mempengaruhi suatu masyarakat. Dominasi ideologi dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga masyarakat, sehingga semakin menonjolnya suatu masyarakat maka semakin kuat kemungkinan hegemoni melalui sarana ideologi.

Gramsci mengungkapkan kepemimpinan hegemoni secara fundamental menyangkut tindakan memproduksi suatu wawasan-dunia, suatu filsafat dan wawasan moral yang diterima oleh kelas dan kelompok lain yang lebih rendah dan beraliansi. Hegemoni dalam bentuk lengkap didefinisikan terjadi jika kepemimpinan intelektual, moral dapat membentuk suatu wawasan baru bagi seluruh masyarakat (Bocock, 2007 : 58, 78).

Salah satu yang membuat kaum kapitalis bertahan adalah genggamannya ideologinya terhadap massa proletar (hegemoni). Hegemoni sebagai superstruktur mempunyai pengaruh dalam masyarakat sipil dalam melakukan perubahan sosial yang radikal. Negara dianggap sebagai alat yang digunakan oleh kelas atas untuk meredam usaha-usaha kelas bawah membebaskan diri dari penghisapan kelas atas (Patria, 2015 : 31).

Pemerintah mendominasi pedagang dengan kepemimpinan intelektual yang dimiliki. Pemerintah berusaha membentuk pandangan baru bagi pedagang dengan gaya bahasa intelektual dan pendidikan yang dimiliki. Pandangan baru ini disampaikan oleh pemerintah melalui konsensus-konsensus yang dilakukan pemerintah bersama pedagang dan sosialisasi yang disampaikan kepada pedagang.

Konsensus yang dilakukan antara lain pada saat pra pembangunan pasar. Hal ini dilakukan untuk meredam protes dan perlawanan yang dilakukan

pedagang pasar. Pendekatan secara psikologis dilakukan untuk memudahkan pemerintah untuk masuk dan mempengaruhi pemikiran pedagang tanpa harus melakukan tindakan kekerasan dan merugikan berbagai pihak. Konsensus awal dianggap berhasil karena pedagang akhirnya menyetujui pembangunan pasar yang sebelumnya pedagang menolak pembangunan tersebut.

Keberhasilan konsensus pertama kemudian dilanjutkan dengan konsensus selanjutnya terkait dengan pembagian lapak pasar. Menghindari adanya perlawanan dari pedagang, pemerintah membentuk strategi untuk mempertahankan aturan-aturan yang telah dibuat untuk melanggengkan kepemimpinan mereka. Hal ini merupakan salah satu hegemoni yang coba dilakukan pemerintah terhadap pedagang dimana kemenangan pemerintah dilakukan melalui jalan konsensus dengan pedagang bukan melalui pertentangan dan kekerasan. Konsensus merupakan sebuah titik tolak dari hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang pasar.

Munculnya perlawanan dari pedagang merupakan perlawanan yang spontan untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Konsensus merupakan titik tolak dari tindakan hegemoni pemerintah. Konsensus yang dilakukan merupakan konsensus yang samar-samar dimana yaitu mencoba mengaburkan keinginan-keinginan yang dimiliki oleh pedagang dengan membentuk persetujuan sadar terhadap keinginan pemerintah.

Pedagang melawan hegemoni pemerintah dengan kesadaran revolusioner yang dimiliki. Perlawanan yang dilakukan yaitu dengan membentuk protes kepada pemerintah dan meninggalkan kios atau lapak mereka dan berjualan di lorong pasar. Pemerintah mempertahankan hegemoni terhadap pedagang dengan cara memberikan pengarahan kepada pedagang. Kesadaran revolusioner

pedagang tidak dapat terjadi karena tekanan ekonomi yang ada. Pedagang harus tetap mengikuti aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah agar mereka tetap bisa mencari nafkah di pasar.

Dari asumsi diatas, peneliti melihat adanya implikasi teori antara teori Hegemoni milik Antonio Gramsci dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Penggunaan teori ini dianggap relevan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini

C. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan dikhususkan dalam sebuah pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Permasalahan pembangunan sudah seharusnya menggunakan pembangunan yang berbasis kepada masyarakat. Dimana masyarakat tidak hanya menerima hasil dari pembangunan yang dikelola oleh masyarakat tetapi juga masyarakat ikut serta untuk membantu dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Selain untuk mengurangi protes akibat kekecewaan masyarakat, peran masyarakat dalam pembangunan memang dibutuhkan. Kepemimpinan dengan cara intelektual memang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih yang berada pada kelas bawah. Namun pemerintah juga harus menunjukkan kepemimpinan yang pro terhadap masyarakat bukan kepemimpinan yang hanya menguntungkan bagi sebelah pihak.